

EDISI II, TELAH DIREVISI

PEMBERANTASAN KORUPSI



**UNTUK MERAHAI
KEMANDIRIAN, KEMAKMURAN,
KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN**

Oleh : Kwik Kian Gie

ISI BUKU

KATA PENGANTAR	ii
SEBERAPA PENTING KKN DIBERANTAS ?	1
KONSEP PEMBERANTASAN KKN	1
<i>Carrot and Stick</i> atau Kecukupan dan Hukuman	1
Reformasi Birokrasi	2
Optimasi setiap Kementrian dan LPND	2
Sistem Penggajian (<i>Salary System</i>)	4
Alternatif lain	4
Kritik	5
Hukuman	6
Dari mana pemberantasan KKN dimulai ?	7
Kendala pemberantasan KKN yang harus kita kenali dengan baik	7
Pembiayaan pemberantasan KKN	9
DAYA RUSAK KKN	10
Kehilangan Kemandirian	13
Ketidak warasan yang tercermin dari angka-angka	14
Elit bangsa sudah menjadi embisil	21
KESIMPULAN	24
GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA	28
TABEL BANK REKAP	29

KATA PENGANTAR PADA EDISI KE II

Buku kecil ini untuk pertama kalinya ditulis sekitar 8 bulan yang lalu sebanyak 10.000 yang telah dibagi habis dengan cuma-cuma.

Saya mendapat banyak masukan dan kritik dari para pembaca, sehingga edisi kedua ini mengalami cukup banyak perubahan dan tambahan informasi yang berarti. Banyak angka-angka terkini yang dipakai untuk mendukung dan menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan materi buku kecil ini.

Pada edisi pertama juga terjadi kesalahan cetak yang sangat mengganggu karena urutan paragraf kacau. Dalam edisi kedua kesalahan tersebut telah diperbaiki.

Karena itu, walaupun telah memiliki dan membaca edisi pertama, disarankan membaca edisi kedua ini bila memang berminat.

Banyak terima kasih atas perhatian yang telah maupun yang masih akan diberikan pada materi yang maha penting ini.

Jakarta, November 2003.

Kwik Kian Gie

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MERAH KEMANDIRIAN, KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN

SEBERAPA PENTING KKN DIBERANTAS ?

Jelas sangat penting. Pemberantasan KKN harus menjadi prioritas yang paling utama, karena kalau tidak, apapun yang dilakukan hasilnya tidak akan optimal. KKN adalah akar dari praktis semua permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi dewasa ini. *KKN is the roots of all evils*. KKN tidak terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Sejak zaman Yunani kuno sudah dikenali adanya pikiran yang sudah teracuni oleh korupsi. Maka sangat sering kita baca istilah *corrupted mind*.

Daya rusaknya KKN sangat dahsyat, karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Bagaimana prosesnya akan saya bahas belakangan. Berbeda dengan kelaziman yang memulai dengan diagnosa dan setelah itu baru mengemukakan terapinya, saya akan langsung mengemukakan bagaimana cara memberantas KKN yang konkret dalam bentuk langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang jelas secara teknis dapat diwujudkan.

Setelah itu baru saya bahas betapa KKN sudah merusak segala sendi kehidupan bangsa, dan bagaimana prosesnya menuju pada perusakan. Bagian ini perlu kita hayati supaya kita satu keyakinan, satu persepsi dan satu tekad dalam memberantas KKN yang sudah demikian hebat merusaknya.

Dalam mencoba menemukan konsep yang konkret dan dapat dilaksanakan, titik tolak adalah manusianya yang harus dibuat bebas KKN atau takut melakukan KKN.

Perangkat hukum, lembaga-lembaga, sistem, prosedur pengambilan keputusan, transparansi dan sebagainya bukannya tidak penting. Tetapi otak manusia yang tidak terbatas kemampuannya akan selalu mampu menyelewengkan atau menghindari segala sesuatunya itu.

KONSEP PEMBERANTASAN KKN

Konsep tentang cara pemberantasan KKN mengandung beberapa tindakan yang menyangkut berbagai bidang yang satu dengan lainnya terkait dengan erat.

Konsep *Carrot and Stick* atau Kecukupan dan Hukuman

Konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana, yaitu menerapkan *carrot and stick*. Keberhasilannya sudah dibuktikan oleh banyak negara, antara lain Singapura dan yang sekarang sedang berlangsung di RRC.

Carrot adalah pendapatan bersih (*net take home pay*) untuk pegawai negeri, baik sipil maupun TNI dan POLRI yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya. Kalau perlu pendapatan ini dibuat demikian tingginya, sehingga tidak saja cukup untuk hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya yang “gagah”. Tidak berlebihan, tetapi tidak kalah dibandingkan dengan tingkat pendapatan orang yang sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta kepemimpinan yang sama di sektor swasta.

Stick atau arti harafiahnya pentung adalah hukuman yang dikenakan kalau kesemuanya ini sudah dipenuhi dan masih berani korupsi. Mengingat akan tingkat atau *magnitude* korupsi sudah sedemikian dalam dan menyebar sedemikian luasnya, hukumannya tidak bisa tanggung-tanggung, harus seberat-beratnya.

Reformasi Birokrasi

Untuk menjalankan roda pemerintahan secara optimal, struktur seluruh pemerintahan perlu ditinjau kembali dengan cara meneliti sedalam-dalamnya dengan maksud supaya jumlah kementerian benar-benar memang diperlukan.

Tugas dan fungsi pokok setiap Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) juga dirumuskan yang sejelas-jelasnya, agar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dengan kementerian lainnya.

Optimasi setiap Kementerian dan LPND

Jumlah pegawai negeri kita sekitar 4 juta orang. Kalau kita secara sekilas saja memperhatikan besarnya gedung-gedung departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), serta gedung-gedung pemerintah lainnya, segera saja muncul pertanyaan di benak kita, berapa pegawai negeri yang bekerja di dalamnya. Lebih-lebih lagi sulit dibayangkan apa saja yang dikerjakan selama jam-jam kerja.

Jumlah PNS yang demikian besarnya tentu tidak terlepas dari kenyataan bahwa selama RI berdiri sampai sekarang tidak pernah dilakukan audit terhadap struktur organisasi, jumlah personalia, garis-garis komunikasi, rentang kendali atau *span of control*, sistem dan prosedur pengambilan keputusan dan sebagainya.

Maka berlakulah apa yang dalam dunia ilmu organisasi dan manajemen dikenal sebagai “Hukum Parkinson”. Teori ini mengatakan bahwa manusia selalu mempunyai kebutuhan dirinya dianggap penting oleh sekelilingnya. Simbol bahwa dirinya penting adalah kalau dapat memperlihatkan dirinya mempunyai banyak anak buah. Maka tanpa sadar bagaikan hukum alam setiap orang dalam organisasi ingin menunjukkan bahwa dirinya penting dengan mengangkat bawahan. Bawahannya ingin dianggap penting dengan cara mengangkat bawahannya juga. Semakin banyak bawahannya semakin dianggap penting kedudukannya dalam masyarakat. Dengan berlakunya

teori ini yang sampai dinamakan “hukum alam”, setiap organisasi mempunyai kecenderungan membengkak tanpa ada gunanya.

Dalam organisasi perusahaan sudah menjadi kebiasaan bahwa secara teratur, misalnya setiap 3 sampai 5 tahun sekali, organisasinya di-audit. Diteliti oleh para ahli organisasi dan manajemen apakah organisasinya masih optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Caranya, para ahli atau konsultan itu tidak melihat pada struktur organisasi yang ada. Mereka mewawancarai pimpinan tertinggi sampai habis-habisan tentang tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya. Kesemuanya ini direnungkan dengan mendalam. Para ahli dan konsultan menggunakan keahliannya menyusun organisasi yang pas dan yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang disusun bukan hanya strukturnya, tetapi juga jumlah personalianya, kualifikasinya, tugas, tanggung jawabnya, sistem dan prosedur pengambilan keputusan, sistem komunikasi dan rentang kendali organisasi atau *span of control*.

Setelah keseluruhan dari organisasi yang ideal terbentuk, dibicarakan mendalam dengan para pimpinan kunci untuk penyempurnaannya. Setelah sempurna betul dan menjadi milik pimpinan organisasi, pimpinan tersebut dengan sendirinya mempunyai komitmen tinggi untuk merealisasikannya.

Keseluruhan gambar dan penjelasan dari organisasi yang optimal ini dibandingkan dengan organisasi yang ada. Hampir dapat dipastikan bahwa organisasi yang ada terlampaui besar, acak-acakan, garis-garis komunikasi simpang siur dan tumpang tindih dan sebagainya. Adalah tugas pimpinan organisasi – yang kalau perlu dapat didampingi oleh para konsultan manajemen – yang mengubah organisasi yang ada menjadi yang baru.

Prosedur ini dinamakan *structure follows strategy*. Ini adalah kebalikan dari yang biasa kita alami. Setiap kali organisasi baru dibentuk atau organisasi lama hendak dibenahi, yang pertama dilakukan adalah menggambar struktur organisasi yang sudah kita kenal, yaitu kotak-kotak yang disusun secara vertikal dan horisontal. Setelah struktur selesai barulah diisi dengan nama-nama orang-orang yang akan ditempatkan dalam posisi yang sudah digambarkan dalam kotak-kotak tersebut. Prosedur ini sangat salah, tetapi sangat lazim dilakukan orang karena keawamannya dalam bidang ilmu organisasi dan ilmu manajemen. Prosedur yang salah ini disebut *strategy follows structure*. Jelas bahwa strategi dikalahkan oleh organisasi yang disodorkan. Bagaimana mungkin tujuan dapat tercapai secara optimal ?

Kita bayangkan apa jadinya kalau birokrasi kita yang selama 58 tahun tidak pernah di-audit seperti yang digambarkan di atas, dan coba dibayangkan betapa jumlah PNS dapat diperkecil dengan segala penghematan yang menyertainya.

Apa hubungan reformasi birokrasi yang digambarkan ini dengan pemberantasan korupsi ? Hubungannya sangat erat. Saya sangat yakin bahwa kalau birokrasi disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuannya yang optimal, jumlah PNS dapat diperkecil banyak sekali. Pengeluaran untuk gaji, ruang kerja, ATK, listrik, biaya perjalanan dan sebagainya akan dapat dihemat dalam jumlah yang besar. Dampaknya

adalah tersedianya sebagian dana yang dibutuhkan untuk menaikkan pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk memberlakukan *carrot and stick*. Dengan pendapatan yang jelas cukup, bahkan cukup “mewah” atau *comfortable*, kita dapat dengan tenang menghukum seberat-beratnya yang masih melakukan korupsi.

Dampak yang tidak langsung berhubungan dengan pemberantasan korupsi dari reformasi birokrasi adalah efektivitas dari birokrasi. Karena birokrasi menciut, kita dapat menempatkan orang-orang yang paling kapabel. Mereka pasti mau karena pendapatan bersihnya sangat memadai dan sama dengan kalau mereka bekerja di sektor swasta yang pendapatannya sudah didasarkan atas *merit system* dan tingginya sudah sama dengan yang berlaku di segmen-segmen lain masyarakat dalam segala jenjangnya.

Sistem Penggajian (*Salary System*)

Sistem penggajian PNS dan POLRI sudah menjadi sangat semerawut. Ini disebabkan karena besarnya gaji yang diterima hanya cukup untuk hidup satu sampai dua minggu saja. Maka dicarikan berbagai macam akal dan rekayasa seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya, tunjangan *in natura* dsb.

Setelah keseluruhan struktur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah terbentuk, sistem penggajiannya dibenahi supaya adil berdasarkan *merit system*.

Yang dimaksud adalah bahwa penjenjangan tingkat pendapatan neto harus proporsional dan adil. Pejabat yang tingkat pengetahuan, tanggung jawab dan pekerjaannya lebih berat harus memperoleh gaji neto yang lebih tinggi. Yang sekarang berlaku adalah bahwa gaji Presiden lebih rendah dari pendapatan Direktur Utama BUMN. Pendapatan neto seorang Menteri lebih rendah dari pegawai menengah dari BPPN.

Maka tindakan pertama adalah membenahi keseluruhan pendapatan neto dari pegawai negeri sipil maupun TNI dan POLRI yang diselaraskan sampai proporsional dan adil berdasarkan *merit system*.

Alternatif lain

Konsep tentang pemberantasan korupsi seperti yang diuraikan di atas membutuhkan dana sangat besar yang harus dikeluarkan relatif sekaligus. Alternatif lain yang dapat dilakukan lebih cepat dengan pembiayaan yang dapat dicicil adalah pemberantasan korupsi yang tidak serempak, tetapi setahap demi setahap yang dimulai dari atas.

Konsep ini pernah dibicarakan dalam pemerintahan Gus Dur dan pada prinsipnya telah diterima oleh beliau sebagai Presiden. Namun batal diimplementasikan.

Dalam konsep tersebut pendapatan bersih yang mencukupi diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Sekjen, Dirjen, Direktur, Kepala Biro dan Pimpro. Kecuali itu juga jabatan-jabatan yang krusial dan

rawan korupsi, yaitu para pejabat pajak, Jaksa, Polisi, para Hakim, para Anggota DPR, para pejabat bea cukai dan lain-lainnya lagi yang perlu diinventarisasi secara teliti. Intinya adalah mengenali sektor-sektor dari birokrasi yang krusial dalam pembocoran keuangan negara.

Pendapatan bersih mereka harus cukup besar, sehingga tidak hanya cukup untuk hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan “gagah”, yaitu bisa menyamai standar yang berlaku di sektor swasta, bahkan di luar negeri. Tetapi kalau setelah itu berani berkorupsi, hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Kalau dengan cara demikian para pejabat tinggi dan PNS yang rawan korupsi itu bisa bebas korupsi atau korupsinya berkurang sangat signifikan, penghematan yang diperoleh dari bebas korupsi atau berkurangnya korupsi secara sangat signifikan di kalangan mereka cukup besar. Dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan bersih mereka akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghematan yang diperoleh dari hilangnya atau berkurangnya KKN pada tingkat birokrasi yang paling atas dan paling rawan KKN.

Yang menjadi kendala adalah bahwa perbedaan tingkat pendapatan bersih antara yang pendapatan bersihnya dinaikkan dalam rangka program pemberantasan KKN dengan bawahannya akan sangat-sangat besar. Ini akan sulit diterima oleh bawahannya. Ketika itu Gus Dur mengatakan bahwa beliau sanggup mengatasi masalah ini. Namun ketika gagasan ini bocor dan para pengamat mulai menghujat habis-habisan, rencana tersebut diurungkan.

Mungkin sekarang dapat diulangi dengan memasyarakatkan terlebih dahulu. Kepada yang belum kebagian kenaikan pendapatan bersih secara drastis diminta hidup dengan cara yang sudah lama dilakukan, yaitu kekurangannya ditutup dengan korupsi. Korupsi yang mereka lakukan kita tolerir dengan menutup sebelah mata. Jumlah yang dikorup toh tidak terlalu besar, karena kekuasaannya yang tidak besar dan tidak relevan atau krusial bagi para penyuaap.

Dengan penghematan yang diperoleh dari bebas korupsinya golongan yang tertinggi dan golongan dengan kekuasaan yang laku dikomersialkan seperti yang telah dirinci tadi, setahap demi setahap peningkatan pendapatan bersih bagi seluruhnya akan dapat tercapai.

Kritik

Gagasan seperti ini langsung saja dikritik. Dalam kabinet Gus Dur tidak sedikit Menteri dan anggota DPR yang langsung saja mengkritik dengan tajam, mengatakan bahwa tidak tahu diri, karena bagian terbesar dari rakyat hidup dalam kemiskinan, kok pemerintah menaikkan pendapatan bersih untuk dirinya sendiri sampai standar internasional. Juga dikatakan bahwa telah dicoba dalam lingkungan Departemen Keuangan yang pernah ditingkatkan 10 kali lipat dan toh masih korup. Jawab saya terhadap kritik-kritik tersebut adalah karena yang masih berkorupsi tidak diapa-apakan. Jadi *carrot*-nya diberikan, tetapi *stick*-nya tidak diterapkan.

Kritik lainnya lagi adalah bahwa naluri manusia untuk mengumpulkan harta kekayaan tidak ada batasnya. Buktinya, para koruptor itu sudah berkorupsi sampai memupuk kekayaan bernilai ratusan milyar dan trilyunan rupiah. Tetapi mereka masih saja dengan penuh semangat berkorupsi terus. Memang benar. Mengapa ? Lagi-lagi karena tidak diapa-apakan, dan mereka sudah terlanjur mempunyai kekayaan yang demikian besarnya, sehingga apapun dapat dibeli yang membuat mereka menjadi kebal hukum. Mengapa semua bisa dibeli ? Karena kalau kekuasaan dijual, baik yang menjual maupun yang membeli tidak diapa-apakan.

Kalau ada pejabat negara yang mengatakan gaji tidak perlu dinaikkan, kemungkinannya mereka korup dan tidak mau korupsi berhenti. Kemungkinan lain adalah mereka sudah kaya dari asalnya, sehingga memang bisa mengabdikan kepada negara dengan pendapatan yang jelas tidak cukup untuk hidup layak. Atau famili dan sanak saudaranya mempunyai pendapatan legal cukup besar yang dapat menunjang kehidupannya dalam baktinya kepada nusa dan bangsa dengan gaji dari pemerintah yang jelas hanya cukup untuk hidup satu atau dua minggu saja. Jumlah orang yang demikian sangat sedikit, dan yang sudah sedikit itu belum tentu, dan bahkan kebanyakan tidak berminat mengabdikan kepada kepentingan orang banyak. Jadi kelompok ini tidak dapat diandalkan sebagai penyelenggara negara. Lagipula, yang kita kehendaki adalah demokrasi, bukan plutokrasi.

Juga ada kritikan yang mengemukakan bukti bahwa para pegawai BPPN itu tanpa dapat diragukan sedikitpun tingkat pendapatan bersihnya cukup untuk hidup dengan sangat gagah. Memang betul, karena mereka direkrut dari perusahaan-perusahaan swasta. Mereka tidak mau bekerja dengan tingkat pendapatan bersih yang lebih kecil. Toh mereka masih korup dalam skala yang luar biasa dan dengan teknik-teknik yang canggih. Banyak dari mereka yang dahulu para teknokrat konglomerat bankir yang menjebol banknya sendiri sampai dirawat di BPPN. Sekarang BPPN dibobol lagi. Mengapa ? Sekali lagi, karena tidak ada hukumannya.

Maka kritik-kritik tersebut semuanya tidak dapat mematahkan ampuhnya *carrot and stick* kalau, sekali lagi kalau *stick*-nya diterapkan betulan.

Hukuman

Setelah gaji dinaikkan sampai adil terhadap setiap PNS lainnya dan besarnya dibuat sangat besar sampai dapat hidup dengan nyaman dan dengan “gagah”, dan masih berani berkorupsi, hukumannya harus sangat berat. Menurut hemat saya dalam kondisi KKN seperti yang kita hadapi sekarang ini, hukumannya haruslah hukuman mati atau paling tidak seumur hidup.

Dalam mengenali masalah kita sudah lumayan, karena istilah yang sudah memasyarakat bukan hanya korupsi, tetapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang terkenal dengan singkatan KKN. Memang korupsi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kolusi, karena korupsi selalu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nepotisme juga merupakan faktor sangat penting, karena korupsi kebanyakan mendapat dorongan dan dukungan kuat dari anak, isteri dan famili terdekat.

Karena itu, hukuman tidak saja dikenakan pada yang melakukan korupsi, tetapi juga isteri dan anak-anaknya. Seperti dikatakan tadi, kebanyakan penguasa melakukan korupsi karena dorongan, rayuan atau renekan dari isteri, suami atau anak-anak. Maka pelakunya dihukum mati, dan anak-anak serta isterinya juga harus dikenakan hukuman. Bentuk hukuman itu misalnya diperlakukan sebagai orang yang telah bangkrut. Semua harta kekayaannya disita. Mereka hanya dibolehkan hidup yang dibatasi standarnya. Misalnya mereka hanya dibolehkan bertempat tinggal di rumah sederhana, hanya boleh menggunakan kendaraan umum, tidak boleh mempunyai mobil sendiri.

Rekan-rekan koruptor yang terlibat dalam korupsinya yang selalu memang kolusif juga harus dihukum berat. Tegasnya, penyuap dan yang disuap harus sama-sama dihukum berat.

Dari mana pemberantasan KKN dimulai ?

Pemberantasan KKN harus dimulai dari pimpinan tertinggi, yang disusul oleh para pejabat tinggi lainnya.

Presiden meyakinkan diri bahwa seseorang memenuhi persyaratan kecakapan dan kepemimpinan untuk jabatan tertentu sebagai pembantunya. Orang ini ditanya apakah mau menerima jabatan yang ditawarkan. Kalau mau, harus menandatangani pernyataan bahwa dirinya bersedia dihukum mati kalau masih berani berkorupsi karena gajinya sudah dibuat adil dan sudah dibuat sangat tinggi yang tanpa keraguan sedikitpun akan dapat hidup dengan nyaman dan "gagah".

Ini tidak berarti hanya Presiden, tetapi semua pimpinan tinggi dan tertinggi negara. Mereka harus sepakat tidak akan melakukan KKN kalau pendapatan bersihnya (*net take home pay*) memang betul-betul mencukupi untuk hidup sesuai dengan *merit system*. Kepada mereka harus dijelaskan yang sangat tegas bahwa akan dihukum seberat-beratnya kalau masih melakukan KKN.

Orang-orang yang termasuk rawan KKN karena menduduki jabatan-jabatan krusial untuk KKN dipilih yang kiranya dapat diajak mulai membersihkan bangsa kita dari KKN. Kepada mereka dijelaskan se jelas-jelasnya bahwa pendapatan bersihnya akan dicukupi sampai benar-benar sangat nyaman. Tetapi kecuali bahwa mereka tidak boleh melakukan KKN dengan ancaman hukuman sangat berat, kepada mereka juga dituntut untuk benar-benar tega dan tegas menghukum yang KKN dan sudah termasuk kategori pendapatan bebas KKN.

Kendala pemberantasan KKN yang harus kita kenali dengan baik

Memang ada orang-orang yang pada dasarnya curang. Terutama kalau yang digelapkan untuk dirinya sendiri adalah uang milik publik, yaitu uang milik pemerintah. Seperti kita ketahui, bagian terbesar dari uang milik pemerintah berasal dari pajak. Untuk uang ini tidak ada yang merasa memiliki secara individual. Yang memberikan uang ini kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak merasakannya sebagai kewajiban yang sudah

termasuk dalam rencana pengeluarannya. Para pembayar pajak itu tidak peduli hasil pajak akan dipakai untuk apa. Maka kalau dicuri oleh para penguasa mereka juga tidak terlampau peduli. Namun sikap yang demikian berlaku pada masyarakat yang kurang terdidik. Untuk menyadari sepenuhnya bahwa uang pemerintah adalah hasil kontribusinya membutuhkan cara berpikir yang lebih abstrak. Kita mengetahui bahwa semakin tinggi tingkat intelektual seseorang, semakin mampu dia berpikir secara lebih abstrak. Cara berpikir yang lebih abstrak selalu berasal dari falsafah.

Kalau kita mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang berawal dari para filosof Yunani kuno atau para filosof India dan China, pada awalnya sekali yang dominan adalah filosofi. Itulah sebabnya sampai sekarang gelar doktor di negara-negara Anglo Saxon adalah Doctor of Philosophy tanpa peduli bahwa kandungan filosofinya kecil sekali. Lambat laun, mungkin karena kandungan pengetahuan teknik yang harus dikuasai begitu banyak dan rumitnya, seorang lulusan perguruan tinggi disebut akademikus, sedangkan seseorang yang pengetahuannya sangat luas dan mendalam disebut intelektual. Di Indonesia, para lulusan perguruan tinggi yang sampai jenjang doktor-pun bangga menyebut dirinya sendiri seorang teknokrat. Hanya Dr. Daed Joesoef yang tidak senang disebut teknokrat. Dia minta disebut teknosoof, yaitu yang menguasai ilmu pengetahuan yang bersifat teknis, tetapi juga menguasai filosofi.

Di Jerman, lulusan perguruan tinggi yang hanya menguasai pengetahuan yang bersifat teknis saja disebut *Fach Idiot*. Artinya dia menguasai ilmu pengetahuan yang sangat teknis dan mendalam sekali, tetapi di luar itu dia tidak tahu apa-apa, bahkan yang bersifat falsafati sedikit saja, dia adalah seorang idiot. Itulah sebabnya di zaman Nazi Jerman, ilmu pengetahuan dipakai untuk menemukan cara-cara membunuh orang-orang Yahudi secara massal dan kemudian untuk menemukan cara-cara menggunakan mayatnya untuk membuat barang-barang konsumsi. Tulangnya dijadikan kancing, rambutnya dijadikan selimut dan kulitnya dijadikan kap lampu.

Di Indonesia yang sangat dominan adalah para teknokrat dan bukan teknosoof. Itulah sebabnya mereka tidak dapat berpikir secara mendalam dan hakiki karena membutuhkan pikiran abstrak yang falsafati, walaupun sedikit saja. Dan karena itu, bersama-sama dengan para pengusaha mereka merasa bahwa menggelapkan uang milik publik tidak apa-apa. Uang ini tidak mempunyai pemilik yang dapat diidentifikasi secara individual. Untuk meyakini bahwa uang ini milik orang banyak yang harus dikelola dengan baik serta dipertanggung jawabkan membutuhkan daya pikir yang lebih abstrak, yang kebanyakan belum dimiliki oleh elit bangsa kita, baik di jajaran pemerintahan maupun di kalangan pengusaha.

Tidak jarang terjadi bahwa kritikan tentang betapa uang pembayar pajak dipakai secara irasional dijawab oleh pejabat tinggi bahwa pembayar pajaknya sendiri tidak ada yang menggerutu. Tidak ada pengusaha yang merasa jijik menyaksikan pengusaha lainnya menyelundup pajak. Mereka bahkan saling membanggakan dan saling menukar pengetahuan bagaimana caranya menyelundup pajak.

Untuk memberantas fenomena ini, hukuman yang sama kerasnya buat yang menyuap juga harus dikenakan. Pendidikan dan pemberian pengertian

tentang pentingnya pajak untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan kita bersama sangat penting. Pemahaman ini sangat minimal di Indonesia.

Pembiayaan pemberantasan KKN

Yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Pemberantasan KKN seperti yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu membutuhkan dana besar. Kita harus menyediakan dana untuk memberikan pesangon buat yang harus di PHK. Pesangon ini harus cukup besar. Pertama supaya manusiawi. Kedua supaya pesangon yang dibuat demikian besarnya membuat tergiur untuk di-PHK, dan ketiga, supaya yang di-PHK mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mencari pekerjaan lain. Besarnya pesangon juga memungkinkan yang di-PHK memakainya sebagai modal usaha sendiri kalau memilih menjadi pengusaha kecil-kecilan. Kenaikan gaji yang sangat cukup untuk dapat hidup sangat nyaman dan “gagah” juga membutuhkan anggaran, walaupun jumlah PNS akan menyusut banyak.

Namun pembiayaan yang sebarangpun besarnya tidak akan ada artinya dibandingkan dengan yang akan dapat dihemat dari konsep pemberantasan KKN yang berhasil, seperti yang akan dijelaskan segera dalam paragraf berikut ini.

Sebagai gambaran sangat kasar, tidak ada Wajib Pajak (WP) yang atas dasar *self-assessment* membayar pajak penuh sebagaimana mestinya. Paling sedikit 50 % yang digelapkan. Dalam penyelesaian akhir (*final settlement*) terjadi negosiasi antara WP dan Pejabat Pajak. Paling sedikit 50 % dari uang yang disepakati dibayar oleh WP sebagai *final settlement* digelapkan oleh Pejabat Pajak.

Kita ambil angka-angka APBN-P tahun 2003. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Non Migas sebesar Rp. 180 trilyun. Yang menguap dikorup kurang lebihnya ya sebesar ini.

Belanja barang rutin sebesar Rp. 16 trilyun. Belanja pembangunan sebesar Rp. 66 trilyun dan belanja daerah yang Rp. 119 trilyun diasumsikan yang untuk barang 30 % atau Rp. 36 trilyun. Seluruhnya sebesar Rp. 118 trilyun. Minimal yang bocor sebesar 30 % atau Rp. 35 trilyun.

Jadi dari perpajakan dan belanja APBN di tahun 2003 secara kasar terkorup Rp. 180 trilyun + Rp. 35 trilyun = Rp. 215 trilyun.

Ikan, pasir dan kayu yang dicuri bernilai 9 milyar dollar AS atau dengan kurs Rp. 8.500 per dollar sebesar Rp. 76,5 trilyun.

Subsidi kepada bank-bank rekap yang tidak ada gunanya, karena kalau ini dicabut bank tidak akan merugi sudah sebesar Rp. 14 trilyun (untuk 10 bank per 31 Desember 2002).

Rekapitulasi jumlah uang yang terkorup adalah : Perpajakan Rp. 215 trilyun. Pencurian ikan, pasir dan kayu Rp. 76,5 trilyun. Subsidi bank rekap yang tidak perlu Rp. 14 trilyun. Seluruhnya Rp. 305,5 trilyun. Dari yang ada angka-angka indikasinya, kalau 30 % dapat diselamatkan karena

pemberantasan tahap pertama ini, pemerintah sudah memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp. 92 trilyun, yang dengan mudah dapat membiayai pemberantasan KKN walaupun mahal.

Jumlah ini belum mencakup bea masuk yang diselundupkan, KKN di Pertamina dan BUMN lainnya, KKN dalam menjual aset BPPN. Pemerasan oleh pejabat BPPN kepada bank-bank yang di bawah kontrolnya karena menikmati *blanket guarantee*, dan masih banyak lagi.

Pemimpin yang normal akan dapat melihat angka-angka seperti ini dengan jernih bahwa potensi menjadi negara bangsa yang kaya, terhormat, mandiri ada di depan mata kalau saja KKN berkurang banyak. Pembiayaannya pun dengan mudah dapat diadakan. Tetapi memang dibutuhkan dana talangan besar, yang dapat dibayar kembali dengan mudah melalui penghematan-penghematan yang diperoleh dari berhasilnya pemberantasan KKN yang sebagian saja. Pikiran yang sudah menjadi *corrupted mind* tidak dapat lagi melihat potensi ini. Bandingkan jumlah uang yang sudah lama dikorup setiap tahunnya dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas manusia pengabdian bangsa melalui pemberian gaji yang tinggi (*carrot*) dalam rangka memberlakukan hukuman yang berat (*stick*). Tetapi tidak terpikirkan. Bahkan dikatakan bahwa buktinya semua bisa hidup dengan cukup mewah. Bukankah dalam ucapan ini sudah tersirat nilai bahwa tidak mengapa berkorupsi untuk bisa hidup sangat nyaman dengan gaji yang rendah ? Bukankah logika seperti ini pencerminan dari jiwa yang sudah sakit, mengingat akan pendidikannya yang begitu tinggi ? Dirinya sendiri memang dapat hidup dengan mewah. Tetapi bagaimana dengan puluhan juta sesama warga negara yang hidup di bawah garis kemiskinan ? Bahwa mereka menderita seperti itu selama berabad-abad lamanya tidak terlepas dari kebijakan yang keluar dari pikiran yang telah korup atau dari *corrupted mind*.

DAYA RUSAK KKN

Kerusakan mental dimulai dari mencuri uang yang bukan miliknya. Pencurian ini dilakukan dalam keterpaksaan karena gaji pegawai negeri yang legal tidak cukup untuk hidup, tetapi sebagai pegawai negeri, terutama yang tinggi-tinggi pangkatnya, mereka mempunyai kekuasaan. Kekuasaan inilah yang disalah gunakan. Pada awalnya dengan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dia bekerja sama dengan pemasok yang disuruh menaikkan harganya berlipat-lipat ganda. Laba yang di atas laba yang normal dibagi antara pemasok dan pejabat yang mempunyai kuasa memutuskan membeli barang dan jasa dengan harga yang berlipat ganda itu.

Jadi pada awalnya penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan terpaksa untuk dapat bertahan hidup. Tetapi secara teknis tidak mungkin mengkorup uang negara yang jumlahnya dipaskan untuk menutup kekurangan pendapatan setiap bulannya. Kalau kekurangan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 20 juta, tidak mungkin dia hanya mengkorup sebesar Rp. 20 juta saja setiap bulannya. Satu transaksi besar yang digelembungkan harganya menghasilkan pendapatan yang satu kali pukul cukup untuk menutup kekurangan setahun. Setelah melakukan ini, dia tidak dapat menjadi jujur kembali untuk sisanya yang 11 bulan. Kalau

dalam pembelian berikutnya dia jujur karena merasa sudah cukup memperoleh hasil korupsi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama 11 bulan berikutnya, dia tidak mungkin membeli barang dan jasa yang sama dengan harga normal yang jauh di bawah harga yang pernah dibayarnya. Dia akan terus melakukan *mark up* supaya ada konsistensi dalam harga barang dan jasa yang dibeli olehnya atas nama pemerintah.

Secara teknis dia tidak bisa berhenti tanpa ketahuan bahwa pembelian yang terdahulu di-*mark up*. Maka korupsi berikutnya juga dilakukan dalam keterpaksaan karena berfungsi sebagai alibi untuk korupsi yang pertama kalinya.

Namun dalam waktu yang singkat dia sudah mulai menikmati kekayaannya yang meningkat tajam seketika, dan masih meningkat terus selama dia menjabat. Tiba saatnya bahwa dia sudah tidak bisa lagi menghabiskan uangnya seumur hidupnya kalau dia hidup nyaman yang layak.

Namun pada waktu itu keseluruhan jiwanya sudah mengalami transformasi. Kebutuhannya tidak lagi sekedar hidup dengan sangat nyaman dan dapat membeli apa saja yang dibutuhkan. Kebutuhannya tidak lagi kenikmatan kebendaan. Kebutuhannya “meningkat” menjadi kebutuhan diakui dan di-wahkan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang kaya. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya juga sudah berubah. Koruptor dikagumi karena kekayaannya tanpa peduli bagaimana dia memperoleh kekayaannya. Dia ingin menjadi pemimpin bangsa dengan membeli suara tanpa malu. Masyarakat juga sudah menganggap bahwa dia tidak perlu malu, karena dia dapat memberi uang. Bayangkan betapa sudah rusaknya bagian terbesar dari anggota masyarakat kita. Tengok berapa banyak koruptor besar yang tanpa malu sedikitpun menjadi calon Presiden, dan di manapun mereka pergi, cukup banyak massa yang mengelu-elukan dan mengaguminya.

Banyak koruptor sudah menghujat penyuap dan yang disuap. Sudah menjadi jelas bahwa jiwanya sudah tidak normal. Mereka sudah menjadi pengkhayal (*fantast*), yang percaya bahwa fantasinya benar. Kalau sudah sampai di sini apa bedanya dengan orang gila yang di tengah jalan mengatur lalu lintas, karena dia yakin betul bahwa dirinya polisi lalu lintas, walaupun sambil bugil ?

Karena dia di mana-mana dihormati orang banyak, lambat laun dia merasa bahwa korupsi bukan suatu kejahatan. Korupsi adalah kecerdikan yang lebih tinggi derajatnya dari kepandaian. Kelainan dalam pikirannya ini berkembang terus sampai dia tidak lagi waras pikiran dan perasaannya.

Pikiran para penguasa yang sudah tidak waras lagi mengakibatkan kerusakan luar biasa pada masyarakat dan rakyat yang dipimpinya.

Kerusakan oleh KKN yang sudah menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, moral, mental dan akhlak membuahakan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Akibatnya ketidakadilan dan kesenjangan yang besar. Sekedar sebagai ilustrasi, per tahun 1998 jumlah seluruh perusahaan di Indonesia 36.816.409. Yang berskala besar sejumlah 1.831 atau 0,01 %. Tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 40 %. Yang 99,99 % memberi andil hanya sebesar 60 %. Dalam andilnya memberikan

lapangan kerja, perusahaan kecil menengah yang 99,99 % itu menyerap sebanyak 99,44 % dari jumlah orang yang bekerja. Setiap perusahaan besar menyumbang Rp. 238 milyar PDB setiap tahunnya. Perusahaan kecil menengah rata-ratanya menyumbang sebesar Rp. 17 juta per tahunnya. Sumbangan rata-rata dari setiap perusahaan besar terhadap PDB 14.000 kali lipat dari sumbangan rata-rata perusahaan kecil menengah kepada PDB. Karena pembentukan PDB kurang lebihnya juga mencerminkan peran atau pendapatan rata-rata, maka ketimpangan pendapatan rata-rata antara perusahaan besar dan perusahaan yang skala kecil menengah timpangnya seperti ini.

Kondisi ini diciptakan oleh para penguasa terpandai selama orde baru yang oleh majalah Time pernah dijuluki sebagai *the most qualified cabinet in the world*.

Bagaimana gambaran yang lebih menyeluruh dari kondisi bangsa kita sekarang ?

Seperti yang saya katakan dalam pidato memperingati 100 tahun Bung Hatta, negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 milyar dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 57 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPN sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai instrumen untuk mengancam sikap dan pikiran yang sedikit saja mencerminkan keinginan untuk mandiri, dan keinginan untuk mempunyai percaya diri serta harga diri. Sikap percaya diri dan sikap harga diri langsung dihujat sebagai sikap anti asing yang kerdil seperti katak dalam tempurung. Sikap yang demikian dianggap sebagai sikap yang berbahaya karena akan membuat kita miskin. Kita dibuat yakin oleh para pemimpin bangsa kita bahwa kita tidak mungkin hidup layak tanpa utang atau bantuan dari negara-negara lain.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah atau *maakloon* yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film "New Rulers of the World" buatan John

Pilger. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil para menteri dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana mereka mengurus bangsanya sendiri? Anehnya, setiap tahun mereka bangga kalau utang yang diperoleh bertambah. Mereka merasa bangga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada IGGI ketimbang kepada parlemennya sendiri. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali. Hal yang sama diulangi di tahun 2000 dan lagi di tahun 2002. Kali ini pembayaran bunganya juga sudah tidak sanggup dibayar sehingga juga harus ditunda pembayarannya. Jumlahnya ditambahkan pada utang pokok yang dengan sendirinya juga menggelembung yang mengandung kewajiban pembayaran bunga oleh pemerintah.

Bank-bank kita digerogeti oleh para pemiliknya sendiri. Bank yang kalah *clearing* dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan fasilitas diskonto. Setelah itu masih kalah *clearing* lagi, dan diselamatkan lagi dengan fasilitas diskono ke II. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk mendanai pembentukan konglomerat sambil melakukan *mark up*. *Legal Lending Limit* dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.

Kepercayaan masyarakat menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp. 2.400 per dollar menjadi Rp. 16.000 per dollar. Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan.

Kehilangan Kemandirian

Kita mengetahui bahwa paket bantuan dari IMF disertai dengan *conditionalities* yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Namun tidak kita perkirakan semula bahwa isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikannya. Juga tidak kita perkirakan pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia menjadikan semua lembaga internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama Letter of Intent atau LOI.

Bank Dunia setiap tahunnya juga menyusun apa yang dinamakan *Country Strategy Report* tentang Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai sekarang setiap tahun

memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru karena jumlah utang keseluruhannya sudah melampaui batas-batas kepantasan dan prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya kalau kita tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan putus sekolah. Demikianlah yang ditakut-takutkan kepada kita oleh lembaga-lembaga internasional beserta kroni-kroni Indonesianya.

Kalau kita baca setiap LoI dan setiap *Country Strategy Report* serta setiap keikutsertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri.

Ketidak warasan yang tercermin dari angka-angka

Tadi telah dikemukakan kebijakan utang luar negeri kita yang dipacu terus sampai tidak *sustainable*. Mula-mula cicilan utang pokok jatuh tempo yang sudah tidak mampu dibayar, pembayarannya dilakukan dengan mencari utangan baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Setelah cara ini tidak mempan lagi, dimintakan penundaan pembayaran utang atau *rescheduling* sampai tiga kali di Paris Club. Toh dikatakan bahwa utang luar negeri *manageable* dan *sustainable*. Maka setiap tahunnya tetap saja berutang terus dari CGI.

Di zaman pemerintahan Soeharto dikatakan bahwa ukuran apakah utang luar negeri *sustainable* atau tidak diukur dengan *Debt Service Ratio (DSR)*. Juga disebutkan patokannya yang sudah merupakan lampu merah, yaitu kalau sudah menyentuh angka 20 %. Ketika angka ini sudah jauh dilampaui, jumlah utang luar negeri digabung dengan utang dalam negeri, dan keseluruhannya dinyatakan dalam persen dari PDB. Persentase ini menurun karena meningkatnya PDB, dan terus dikatakan bahwa pengelolaan utang bagus dan terkendali. Menurut hemat saya ini adalah pencerminan dari *corrupted mind* yang sifatnya mengelabui masyarakat. Mengapa ?

Debt Service Ratio adalah perbandingan antara pemasukan devisa dan pembayaran utang dalam valuta asing. Perbandingan ini sangat penting dan terlihat jelas korelasinya. Rasio ini adalah rasio likuiditas. Sekarang tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat. Yang dilaporkan adalah seluruh utang pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri dinyatakan dalam persen dari PDB.

Mengapa kalau rasio ini menurun kemungkinan pemerintah membayar utang menjadi lebih besar tidak jelas hubungannya. Baru jelas kalau ada korelasi antara besarnya PDB dan penerimaan pemerintah yang dapat dipakai untuk membayar utang. Hubungan ini memang ada, tetapi sangat samar-samar. Yang membentuk PDB bukan pemerintah sendiri. Bagian terbesar justru perusahaan-perusahaan swasta. Memang bisa dikatakan bahwa PDB yang meningkat berarti laba perusahaan-perusahaan swasta meningkat, sehingga laba kena pajak meningkat dan pendapatan pajak pemerintah juga meningkat. Benar, tetapi sangat jauh dan samar. Logika ini

tidak klop dengan yang selalu dikemukakan oleh pemerintah bahwa meningkatkan pajak paling efektif adalah melakukan ekstensifikasi karena masih banyaknya orang berpendapatan tinggi yang tidak mempunyai NPWP. Ini memang kenyataan, dan karena itu ekstensifikasi penjarangan wajib pajak baru lebih relevan untuk Indonesia dewasa ini sampai entah kapan. Yang jelas masih panjang ruang gerakanya. Mengapa jumlah utang dalam persen dari PDB yang ditonjolkan terus ? Lagi-lagi menurut pendapat saya didasari oleh *corrupted mind*.

Kita ambil angka-angka dari RAPBN tahun 2004 karena ketika buku ini ditulis belum dibahas di DPR. Biasanya setelah menjadi APBN 2004 perubahan-perubahannya tidak signifikan. Lagipula, antara APBN dan pelaksanaannya pasti akan ada deviasi. Maka untuk kepentingan analisis, angka-angka RAPBN 2004 dapat dipakai tanpa mengganggu kesimpulan-kesimpulannya.

Mengacu pada RAPBN tahun 2004, apa semua yang harus kita lakukan untuk menutup pengeluaran pemerintah, walaupun dikatakan jumlah utang sudah menurun ? Dari dalam negeri menguras tabungan dari Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp. 26,34 trilyun, menjual BUMN senilai Rp. 5 trilyun, menjual aset BPPN senilai Rp. 5 trilyun yang nilai bukunya berlipat-lipat ganda. Menerbitkan surat utang baru senilai Rp. 28 trilyun. Dari luar negeri masih harus utang lagi sebesar Rp. 6,52 trilyun sebagai utang program, sebesar Rp. 19,97 trilyun sebagai utang proyek dan penerbitan obligasi pemerintah dalam valuta asing sebesar Rp. 3,48 trilyun. Jumlah seluruhnya Rp. 94,31 trilyun yang sifatnya melikwidasi kekayaan dan berutang baru.

Mari kita tengok penderitaan apa semua yang harus kita pikul walaupun jumlah utang pemerintah dinyatakan dalam persen dari PDB menurun yang dipuji oleh masyarakat internasional dan oleh kelompok ekonom tertentu. Bunga utang pemerintah yang luar negeri sebesar Rp. 24,66 trilyun dan yang dalam negeri sebesar Rp. 43,84 trilyun atau seluruhnya Rp. 68,5 trilyun. Bandingkan dengan anggaran pembangunan sebesar Rp. 68,1 trilyun yang lebih kecil dari pembayaran bunga utang saja. Jelas bahwa kemampuan kita untuk membangun sangat dipersempit oleh pembayaran bunga utang saja. Lantas kalau utang dibuat demikian besarnya ini yang dibela sebenarnya dahulu itu apa dan siapa ? Entahlah, tentunya yang membuat kebijakan ketika itu yang mengetahuinya.

Tadi itu hanya pos bunga utang. Belum pembayaran utang pokoknya yang jatuh tempo. Utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp. 44,89 trilyun. Utang dalam negeri yang jatuh tempo sebesar Rp. 18,9 trilyun dan surat utang (obligasi) yang dirasa perlu dibeli kembali sebesar Rp. 5,6 trilyun. Seluruhnya Rp. 69,39 trilyun. Lagi, kok utang digenjot terus sampai pembayaran pokoknya yang jatuh tempo di tahun 2004 saja sebesar ini untuk membela apa dan siapa ?

Pertanyaan yang selalu menghinggapinya adalah apa yang ingin dibela dengan utang yang membengkak sedemikian besarnya ? Dalam hal utang luar negeri tidak jelas, tetapi paling tidak jumlahnya merupakan akumulasi selama 36 tahun dan banyak wujud yang dapat kita saksikan dalam bentuk prasarana.

Utang dalam negeri yang dalam waktu “sekejap” dari nol menjadi sedemikian besarnya untuk membela apa dan siapa ? Yang terbesar untuk mempertahankan dan menyelamatkan bank. Kalau kita tidak menghitung BLBI-nya, tetapi hanya Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) saja, jumlah nominalnya Rp. 430 triliun dan pembayaran bunga untuk utang pokok ini Rp. 600 triliun. Jumlahnya membengkak seiring dengan ketidak mampuan pemerintah membayar OR yang jatuh tempo melalui pembayaran bunga yang membesar.

Bagaimana kondisi perbankan ? Apakah sehat ? Kita lihat Tabel yang memberikan gambaran tentang kesehatan bank ditinjau dari sudut kemampuannya membuat laba (halaman terakhir). Di kolom 3 kita saksikan bahwa sepuluh bank rekap membukukan laba bersih yang cukup besar. Tetapi itu hanya mungkin karena pemerintah memberikan penghasilan bunga yang tidak ada bedanya dengan subsidi. Perincian serta jumlahnya ada di kolom 4. Kalau ini tidak dihitung, semua bank merugi sangat besar yang ditunjukkan oleh kolom 5.

Yang aneh, manajemen bank menjadi yakin bahwa bank meraih laba besar karena prestasinya, bukan karena subsidi. Mereka membanggakan diri, menggaji dirinya sendiri sangat besar dan karena banknya meraih laba, memberikan kepada dirinya sendiri bonus dan gratifikasi.

Mari kita bandingkan dengan kebutuhan sektor-sektor lain sangat penting dalam penyelenggaraan negara.

Sektor pendidikan memperoleh alokasi tertinggi dari anggaran pembangunan yaitu sebesar Rp. 15,25 triliun. Ini hanya 22,26 % saja dari bunga utang yang harus dibayar. Kalau cicilan pokoknya ditambahkan hanya 11,06 % saja.

Kondisi TNI/POLRI kita sangat mengenaskan, baik dalam persenjataan maupun dalam mempertahankan kondisi fisik para anggotanya. Belum lama ini kita diejek dan dilecehkan di atas bumi kita sendiri oleh 5 buah pesawat Hornet AS yang mengepung dan me-lock 2 pesawat F-16 kita. Kita punya hanya 2 buah ini. Ketika

berupaya membeli lagi yang jauh lebih murah dari Russia, yaitu pesawat Sukhoi, tak ada uangnya sehingga harus main akrobat melalui imbal beli yang menimbulkan masalah lagi. Dalam mempertahankan NKRI dan memerangi terorisme, anggaran pembangunan dinaikkan sampai yang terbesar kedua setelah sektor pendidikan. Anggaran pembangunan untuk sektor pertahanan dan keamanan menjadi Rp. 10,53 triliun. Alangkah kontrasnya kalau kita nyatakan dalam persen dari pembayaran bunga utang saja. Jatuhnya hanya 15,37 % saja.

Infra struktur kita rusak berat. Tiada hari tanpa rel kereta api yang patah. Tetapi alokasi anggaran pembangunan untuk sub sektor transportasi darat sebesar Rp. 1,75 triliun atau hanya 2,55 % saja dari kewajiban pembayaran bunga utang. Kalau cicilan utang pokok ditambahkan, sub sektor perhubungan darat hanya 1,27 % saja dari semua pengeluaran uang yang berhubungan dengan utang. Ini keseluruhan sektor perhubungan darat yang di dalamnya macam-macam, antara lain rel kereta api yang rusak berat.

Kalau kita menengok uang yang tersedia untuk perbantuan kepada sekitar 40 juta sesama warga negara yang miskin supaya tidak sakit parah atau meninggal dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yang harus dilakukan untuk membayar bunga dan cicilan pokoknya, lebih-lebih lagi menyedihkan. Pemerintah mengembangkan sekitar 54 program yang dilakukan oleh berbagai kementerian ke dalam 15 sektor. Jumlah seluruhnya sekitar Rp. 12 trilyun. Ini hanya 17,62 % dari anggaran pembangunan. Pengeluaran untuk membayar cicilan utang dan bunga sebesar 202,48 % dari anggaran pembangunan.

Beban Obligasi Rekap Perbankan (OR) yang selalu sangat merisaukan banyak orang sekarang mulai menampakkan diri dengan angka-angka yang sangat mengerikan. Akankah keuangan negara bertahan untuk tahun 2005 ke atas kalau kita bersikap konvensional ? Apakah ini yang dikatakan bahwa fiskal kita *sustainable* walaupun ada beban OR yang demikian dahsyatnya ? Beban OR ini akan berlanjut entah sampai berapa tahun lagi ke depan. Semua usulan menuju peringanan ditampik oleh IMF dan Tim Ekonomi. Lantas beban OR yang demikian beratnya ini untuk kepentingannya berapa orang ? Seperti dikatakan tadi, yang miskin sekitar 40 juta orang.

Sambil melakukan ini semuanya, kita terpaksa harus berutang baru setiap tahunnya di forum CGI. CGI yang dipandu oleh dan bersama-sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia terus menerus memberikan utangan baru asalkan pemerintah Indonesia nurut mutlak dan 100 % pada apa saja yang dikatakan oleh IMF sebagai pemimpin seluruh masyarakat internasional yang tergabung dalam kartel CGI, Paris Club, London Club, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Masyarakat internasional yang sama ini selama pemerintahan Soeharto yang 32 tahun itu melarang pemerintah Indonesia berutang kepada rakyatnya sendiri di dalam negeri dalam rupiah. Tetapi kelompok yang sama bersama-sama dengan partner Tim Ekonomi Indonesia dalam pemerintah yang berasal dari kelompok ekonom Indonesia yang sama juga mendadak merasa tidak apa-apa berutang kepada rakyatnya sendiri yang besarnya melebihi utang luar negeri. Dalam dua tahun jumlah utang dalam negeri dari nol menjadi sekitar hampir Rp. 700 trilyun. Karena bunganya tinggi, kewajiban pembayaran bunga juga tinggi, sehingga kalau ditambahkan pada jumlah utang pokok dalam negeri akan mencapai ribuan trilyun rupiah. Para ekonom yang sama-sama berasal dari kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia juga merasa tidak apa-apa berutang dalam negeri yang demikian besarnya. Perlu dicatat bahwa selama 32 tahun mereka berkuasa melayani Presiden Soeharto, mereka sangat-sangat mentabukan pinjam kepada rakyatnya sendiri di dalam negeri. Anak buahnya dan jaringannya yang sekarang masih ada di mana-mana mendadak merasa tidak apa-apa berutang sampai ribuan trilyun rupiah di dalam negeri. Ada apa ? Sekonyong-konyong dibela dengan argumentasi dan parameter yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, yaitu tidak apa karena jumlahnya dalam persen dari PDB akan turun terus. Persis sama dengan yang saya dengar dari para majikan IMF dan negara-negara kreditur. Tadinya utang masih kepada bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah. Tetapi surat pernyataan utang itu semuanya akan dijual kepada swasta. *On top* dari itu, pemerintah juga merintis pasar obligasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maksudnya jelas agar setiap saat

pemerintah dapat menerbitkan surat utang yang dibeli oleh masyarakat luas. Sekonyong-konyong tidak apa-apa kalau terjadi *crowding out* atau rebutan antara sektor pemerintah dan sektor swasta.

Sementara gambaran utang seperti tersebut di atas, kita membiarkan ikan kita dicuri senilai US \$ 3,5 milyar. Pasir yang dicuri sebesar US \$ 3 milyar. Hutan yang sudah gundul masih ditebang secara liar dan hasilnya laku dijual senilai US \$ 2,5 milyar. Kalau ini dijumlah sudah mencapai US \$ 9 milyar setahun. Tetapi kita mengemis utangan sebesar US \$ 3 milyar setahun *on top* dari penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga di Paris Club sambil dimintai pertanggung jawaban bagaimana pemerintah Indonesia mengurus bangsanya sendiri. Apa hubungan kerusakan ini semuanya dengan KKN yang sudah membuat kita tidak waras lagi ? Karena para pemimpin kita tidak dapat melihat bahwa apa yang tergambarkan itu sudah sangat merusak keuangan negara dan akan merusak terus yang semakin hari semakin hebat. Pernyataan-pernyataan pendapat dari elit penguasa menganggap kesemuanya itu normal-normal saja.

Pemerintah harus menjalankan kebijakan IMF. Sedikit kebijakannya yang baik, tetapi banyak yang merusak keuangan negara secara fatal. Selama program berjalan, pinjamannya diberikan sedikit demi sedikit setelah dinilai sebagai *good boy* menjalankan semua perintah IMF. Elit bangsa kita memuji perolehan kucuran dana IMF ini, padahal tidak boleh dipakai dan kita harus membayar bunga. Yang lebih sulit dimengerti, sejak kuartal pertama tahun 2001 setiap kali kita menerima beberapa ratus juta dollar, yang dibayar kembali lebih banyak. Sejak tahun 1997 total penerimaan sebesar \$ 12 milyar, dan yang sudah dibayarkan \$ 3 milyar. Setelah itu terjadi perolehan baru dan pembayaran kembali. Diperkirakan bahwa pada akhir tahun 2003 sisa utang dari IMF sebesar US\$ 9 milyar yang jauh melampaui kuota Indonesia yang sekitar US\$ 3 milyar. Karena melampaui kuota, walaupun hubungan dengan IMF dalam bentuk *Extended Fund Facility* (EFF) berakhir, Indonesia masih dikenakan pemandoran oleh IMF yang disebut *Post Program Monitoring*. Isinya adalah bahwa IMF berhak datang empat kali setahun ke Indonesia untuk melihat apakah kebijakan pemerintah baik, dan apakah dilaksanakan dengan baik. Pendapatnya diumumkan kepada seluruh dunia.

Indonesia lepas dari pemandoran dalam bentuk PPM ini kalau saldo utangnya sama atau lebih kecil dari kuota yang sebesar US\$ 3 milyar. Sejak akhir tahun 2003 Indonesia tidak akan menerima utangan lagi, dan mulai mencicil utangnya yang US\$ 9 milyar itu. Namun jadwal pembayarannya ditentukan oleh IMF dengan pola yang membuat sisa utang menjadi US\$ 3 milyar pada akhir tahun 2007. Jadi kalau tergantung IMF, Indonesia baru bebas dari pemandoran pada akhir tahun 2007.

Mengapa utang IMF yang sebesar US\$ 9 milyar itu tidak dilunasi saja ? Buat saya waktunya melunasi bukannya pada akhir tahun ini, tetapi sekarang juga. Mengapa ? Karena sisa utang IMF yang US\$ 9 milyar itu tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa kita sendiri yang sebesar US\$ 25 milyar habis total. Di tahun 1997 cadangan devisa kita sebesar US\$ 14,7 milyar dan meningkat terus sampai mencapai US\$ 25 milyar. Apa rasionalnya mempertahankan sisa utang yang US\$ 9 milyar ? Alasan yang dikemukakan oleh para ekonom Indonesia dari kelompok tertentu mengatakan bahwa kalau sisa utang IMF yang US\$ 9 milyar dikembalikan,

cadangan devisa anjlok dari US\$ 34 milyar menjadi US\$ 25 milyar. Karena itu kepercayaan masyarakat internasional akan guncang. Alasan lain mengatakan bahwa sisa utang dipertahankan supaya Indonesia dimandori oleh IMF sampai akhir tahun 2007. Menurut mereka, bangsa dan para pemimpin Indonesia tidak dapat bekerja dengan disiplin kalau tidak dimandori oleh orang asing.

Bantahan saya yang saya kemukakan dalam sidang-sidang kabinet dan forum-forum lainnya adalah bahwa yang US\$ 9 milyar itu sama sekali tidak boleh dipakai sebelum yang milik sendiri sebesar US\$ 25 milyar habis, sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa cadangan devisa kita sebesar US\$ 34 milyar. Yang kita katakan adalah bahwa cadangan devisa kita yang di tahun 1997 sebesar US\$ 14,7 milyar meningkat terus atas kekuatan sendiri menjadi US\$ 25 milyar sekarang ini. Banyak sekali para Duta Besar yang setuju dengan pandangan ini.

Tentang kepercayaan dunia internasional yang akan guncang, marilah kita telaah pola yang mempertahankan sisa utang IMF sebesar US\$ 9 milyar. Seperti dikatakan tadi, utang ini adalah *second line of defense* yang hanya boleh dipakai kalau cadangan sendiri habis total. Telah dikemukakan juga bahwa pola pencicilan utang IMF yang US\$ 9 milyar ditentukan oleh IMF dengan saldo utang menjadi US\$ 3 milyar di tahun 2007. Supaya utang dari IMF boleh dipakai sebagai *balance of payment support*, cadangan devisa milik kita sendiri harus habis terlebih dahulu. Katakanlah bahwa cadangan sendiri akan merosot terus setiap bulannya dan habis total di tahun 2007. Menurut pola pembayaran utang yang ditentukan oleh IMF, pada akhir tahun 2007 nanti itu, ketika (dalam pengandaian ini) cadangan devisa kita nol, sisa utang IMF yang boleh dipakai menjadi US\$ 3 milyar. Maka yang kita umumkan kepada dunia ketika itu nanti berbunyi : "Wahai masyarakat dunia, cadangan kita habis total, tetapi untunglah masih ada sisa utang dari IMF yang sebesar US\$ 3 milyar." Apakah gambaran cadangan devisa Indonesia yang US\$ 3 milyar itu dan itupun hasil utang dari IMF, tidak menghancurkan- leburkan kepercayaan dunia internasional kepada kita ?

Setiap kali saya mengemukakan argumen ini, tidak ditanggapi atau dibantah secara frontal. Didengarkan, dianggap saya tidak pernah mengatakan seperti ini, lalu diulang lagi dengan mengatakan "kalau yang US\$ 9 milyar dikembalikan, cadangan devisa akan anjlok dari US\$ 34 milyar menjadi US\$ 25 milyar dan kepercayaan masyarakat menjadi guncang.

Bayangkan, utang kepada IMF tidak boleh dipakai, tetapi dikenakan bunga sebesar sekitar 4 % setahun. Per akhir tahun 2002 bunga yang sudah dibayarkan sebesar US\$ 1,75 milyar. Tentang hal ini saya dibantah oleh para pejabat Bank Indonesia. Dikatakan bahwa tingkat bunga yang dibayar sebesar 2,3 % saja, dan oleh BI diputarkan menghasilkan 2,6 % sehingga memperoleh laba sebesar 0,3 %. Saya minta *working paper* yang menyimpulkan tingkat suku bunga ini. Dijanjikan, tetapi sama sekali tidak pernah diberikan.

Sebaliknya dari data statistik oleh BI sendiri dapat disusun kapan kita menerima utang berapa, kapan kita membayar cicilan berapa dan kapan kita membayar bunga berapa. Dari sini tingkat bunga rata-rata dalam persen dapat dihitung. Saya minta dosen ahli ilmu hitung keuangan dari

STIE IBII untuk menghitung tingkat suku bunga atas dasar tabel tersebut. Saya juga minta staf Bappenas dan staf perusahaan Triple A menghitungnya. Semuanya menghasilkan tingkat suku bunga sekitar 4 %.

Lebih jelas lagi, dalam salah satu sidang kabinet, Menko Perekonomian mengatakan bahwa tingkat suku bunga untuk utang dari IMF sebesar 4 % yang *incredibly low*. Dalam sidang kabinet itu juga saya katakan bahwa 4 % tidak rendah. Kalau kita mendepositokan uang kita dalam bentuk dollar AS di bank manapun juga, bunga deposito yang kita peroleh kurang dari 1 % setahun.

Lagi-lagi jalan pikiran orang pandai dan berpendidikan tinggi sudah tidak dapat diikuti oleh nalar yang sederhana, tetapi toh diberlakukan yang sangat membebani keuangan negara yang sudah bangkrut.

Tentang bangsa dan para pemimpin Indonesia yang tidak dapat bekerja tanpa pemandoran oleh orang asing, sehingga yang dibutuhkan bukan uangnya, tetapi pemadorannya. Kalau memang maunya begitu, mengapa tidak dibayar saja sisa utang yang US\$ 9 milyar supaya kita bebas membayar bunga, tetapi kita minta supaya dimandori terus saja ? Untuk yang *se-absurd* ini mereka mengerti. Maka ngotot tidak mau mengembalikan utang IMF yang US\$ 9 milyar. Untunglah masih ada rasa malu. Tetapi atas biaya logika yang jungkir balik, yaitu harus menipu diri sendiri dengan mengatakan sisa utang US\$ 9 milyar perlu sedangkan sebenarnya sama sekali tidak perlu. Selalu dikatakan perlu untuk alibi dalam membela keinginannya dimandori oleh IMF. Tidakkah menyedihkan setelah 58 tahun merdeka ? Bukankah ini menyalahi konsensus bangsa Indonesia ketika kita merdeka ? Konsensusnya tidak peduli dalam kondisi hancur lebur seperti apapun juga, kita harus merdeka menit ini juga (baca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang terkenal dengan nama "lahirnya Pancasila"). Dalam pembelaannya ketika diadili di Den Haag di tahun 1928 Bung Hatta mengakhiri dengan mengatakan "Lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar laut daripada dijajah oleh Belanda."

Apa hubungan antara patuh kepada IMF dengan korupsi ? Mental dan *mindset*-nya sudah korup, sehingga tidak bisa lagi melihat persoalan dengan jernih, apakah IMF masih ada gunanya atautkah sudah banyak merusak dan akan merusak terus. Mari kita telaah dengan cermat panduan atau bahkan "paksaan" oleh IMF dalam kebijakan pemerintah tentang perbankan. Serentetan kebijakannya mengakibatkan bahwa setiap tahunnya minimal sekitar Rp. 80 trilyun anggaran dipakai untuk membiayai perbankan yang tidak pernah menjadi lebih sehat setelah sekitar 5 tahun diberi subsidi sebesar itu. Secara konsepsional bank tidak akan pernah dapat berfungsi sebagai intermediasi yang menjadi hak hidupnya selama perbankan Indonesia nurut dengan cara menghitung kecukupan modal atau CAR yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dan dipaksakan oleh IMF untuk diikuti oleh Indonesia. Kesemuanya ini diterima dan dijalankan sampai saat ini tanpa dapat melihat apa dampaknya buat kita dalam jangka menengahnya.

Elit bangsa sudah menjadi embisil

Kita lihat bahwa daya rusak KKN ditinjau dari sudut kebendaan sudah sangat dahsyat, karena pikirannya yang sudah tidak waras. Pikiran yang sudah menjadi tidak waras kecuali dipakai untuk merusak diri sendiri, lambat laun menjadikan manusianya itu sendiri menjadi embisil.

Lambat laun akan membuat daya pikir dan cita rasa sangat aneh. Kecerdasan otak, perasaan, cita rasa dan emosi positif yang membedakan manusia dari binatang lambat laun juga pudar. Tentu tidak menjadi musnah sama sekali sehingga mereka hanya hidup dari insting seperti halnya dengan binatang. Mereka tetap pandai dan tetap mempunyai emosi, tetapi dipakai untuk hal-hal yang merusak lingkungannya dan merusak martabatnya sendiri sebagai manusia. Logikanya terbalik-balik, tetapi masih cerdas yang sekarang kecerdasannya dipakai untuk pembenaran terhadap pikirannya yang terbalik-balik. Emosi dan citarasanya juga mulai kacau balau. Insting kebinatangannya lebih menonjol karena mereka sudah tidak lagi mempunyai perasaan iba dan tidak lagi mempunyai rasa belas kasihan terhadap sesama manusia. Lebih hebat lagi, mereka tidak lagi takut terhadap Tuhan. Dalam kondisi dan *timing* yang dianggapnya cocok, mereka menggunakan agama sebagai tameng. Mereka mendadak dibaptis dan menjadi pengunjung gereja yang setia. Mereka bahkan berkhotbah dan memberikan kesaksian. Demikian meyakinkannya, sehingga sulit dibayangkan bahwa mereka sedang berbohong kepada Tuhan. Pada tahapan yang sudah seperti ini, dia memang tidak berbohong. Virus KKN sudah merasuk ke dalam otak dan emosinya, sehingga dia sudah menderita penyakit jiwa yang dinamakan *make believe*. Mereka berfantasi, dan lambat laun percaya bahwa fantasinya adalah fakta. Mereka berfantasi bahwa mereka dibolehkan oleh Tuhan untuk ber-KKN asalkan tetap ke gereja dan semakin fanatik, semakin boleh melakukan apa saja.

Kita menyaksikan demikian banyaknya konglomerat jahat yang mendadak menjadi pemeluk agama yang demikian fanatiknya. Maka kita juga mendengar komentar dari banyak sekali orang yang masih lebih normal dan sama-sama pemeluk agama yang sama. Mereka mengatakan bahwa para konglomerat jahat yang begitu religius dan setiap hari Minggu memberikan kesaksian berbohong tujuh kali seminggu. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu berbohong kepada sesama manusia dalam melakukan KKN-nya. Pada hari Minggu di gereja, ketika memberikan kesaksian mereka juga berbohong, tetapi kali ini kepada Tuhan dan dilakukan di rumah Tuhan.

Pada tahapan yang paling akhir dan sangat mengkhawatirkan, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku sekolah yang sekian lamanya dan hanya dapat diperoleh dengan otak yang cerdas dipakai untuk hal-hal yang sudah tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dipahami oleh logika yang paling elementer sekalipun. Pada tahapan ini mental yang korup sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kepentingan kebendaan. Contohnya adalah demikian banyaknya ucapan dari elit bangsa yang begitu bertentangan dengan nalar yang paling mendasar. Saya dapat menyebutkan banyak fakta secara eksplisit, baik yang diucapkan di mana-mana sampai sekarang maupun yang mengucapkannya. Tetapi itu tidak akan saya lakukan, karena hanya akan menyakitkan hati orang lain dan menanam benih kebencian.

Sebagai ilustrasi supaya tidak ada orang Indonesia yang sakit hati, saya ingin mengambil contoh Nazi Jerman di bawah Hitler. Bayangkan, bagaimana mungkin orang-orang yang demikian tinggi pendidikannya menggunakan ilmu pengetahuan yang dikuasainya untuk menemukan cara-cara membunuh jutaan orang Yahudi secara efisien. Setelah itu bagaimana caranya menggunakan mayat-mayatunya sebagai bahan baku untuk membuat barang-barang konsumsi. Rambutnya dijadikan selimut. Tulangnya dijadikan kancing dan kulitnya dijadikan kap lampu. Manusia yang masih hidup dijadikan kelinci percobaan di dunia kedokteran. Tulang sengaja dipatah untuk kemudian dioperasi sebagai latihan. Dan masih banyak lagi.

Contoh ini saya ambil karena paling kontemporer dan paling dahsyat. Tetapi kalau kita pelajari sejarah umat manusia, banyak sekali raja-raja dan kaisar-kaisar yang melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan, apalagi dicerna oleh manusia yang masih normal. Toh ditopang oleh orang-orang yang paling pandai di negerinya. Contohnya adalah China. Ribuan tahun yang lalu, selama berabad-abad, walaupun sangat feodal, banyak raja-raja dan kaisar-kaisar China yang merekrut para pejabat tingginya melalui ujian yang sangat demokratik. Siapapun boleh ikut ujian menjadi pejabat sangat tinggi bahkan tertinggi kecuali sang raja atau sang kaisar. Dapat dibayangkan betapa pandainya mereka. Toh mereka mati-matian merebut kedudukan untuk menjadi bawahannya raja dan kaisar yang perasaan dan perilakunya sudah *pervers*, sudah sangat menjijikkan. Ada kaisar wanita yang setiap pagi minta disediakan ratusan macam hidangan oleh para pembantu rumah tangga dalam antrean panjang untuk sarapan. Setiap macam hidangan diperlihatkan sang kaisar agar dia bisa memilih mana yang mau dimakan dan mana yang diberikan kepada para pembantunya, tetapi yang membawa piringnya tidak boleh melihat sang kaisar. Cukup sering terjadi bahwa mereka tidak dapat menahan keinginannya untuk melihat wajah sang kaisar, sehingga bagaikan refleks menengoknya. Dia langsung dihukum mati dengan memancung kepalanya. Tempat pemancungan disediakan secara khusus dalam kompleks istana. Bahwa sang kaisar begitu biadab sudah sangat parah. Tetapi yang lebih parah lagi adalah bahwa orang-orang terpandai mendukungnya dengan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai birokrat tingkat tinggi dan tertinggi.

Bagaimana dengan di Indonesia ? Tidak separah itu, tetapi sudah sangat mengkhawatirkan. Perasaan dan perilaku orang-orang terpandainya juga sudah mirip-mirip dengan elit bangsa yang sakit kalau kita mengacu pada sejarah bangsa-bangsa lain, yaitu dianggap biasa saja bahwa mereka mendukung dan membantu siapa saja yang sedang berkuasa tanpa peduli kekuasaannya dipakai untuk apa. Itulah sebabnya mengapa KKN menjadi demikian hebat dan dahsyatnya seperti yang kita alami sekarang ini. Mereka mendukung kebijakan KKN selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi ketika pimpinan berganti orang, merekapun mendekati dan melekatkan diri pada yang baru berkuasa dan berkuasanya karena justru berseberangan dengan segala kebengisan dan KKN yang hebat dari majikannya terdahulu, sehingga akhirnya tergusur oleh rakyat. Ketika pimpinan tertinggi mulai goyah, elit terpandai tetapi sudah sakit KKN jiwa raganya itu bagaikan kutu loncat melompat pada kekuasaan baru. Kekuasaan baru dimaksud untuk membuat koreksi terhadap segala sesuatu yang dianggap salah di masa lampau. Tetapi demikian pandai,

canggih dan tanpa malu para kutu loncat itu. Dengan *corrupted mindset*-nya, pikiran dan praktek yang serba sesat dilanggengkan. Maka reformasi mati suri.

Logika juga sudah dijungkir balikkan dengan pembelaan yang gigih, tetapi isinya hanya menggebrak dengan dalil-dalil tanpa argumentasi. Banyak istilah-istilah terang-terangan diartikan lain. Utang yang jelas-jelas utang disebut pendapatan untuk pembangunan. Pemberi utang yang mengenakan rente disebut donor. Anggaran yang terang-terangan defisit disebut berimbang. KKN dibenarkan, yang dibela dengan dalih bahwa karena hanya melalui KKN menjebol uang bank, maka industri-industri besar dapat tumbuh dan PDB meningkat terus. Maka semuanya justru yang sangat besar merugikannya dibebaskan dengan pemberian *Release and Discharge* (R&D). Pembelaan terhadap pemberian R&D tidak dapat dimengerti, karena lagi-lagi menggebrak tanpa argumentasi. Pejabat sangat tinggi dalam bidang penegakan hukum terang-terangan menawarkan *trade off* mau menghukum orang yang bersalah atau memperoleh kembali uang curiannya. Ketika ukuran besarnya utang luar negeri yang biasanya *Debt Service Ratio* (DSR) sudah melampaui batas, ukurannya diubah menjadi % dalam PDB. Tidak peduli apakah dengan ukuran yang mengakibatkan angka lebih rendah itu juga mengakibatkan penjadwalan utang tiga kali, dan harus utang terus; juga tidak peduli apa semua yang harus dilakukan dengan kerugian sebesar berapapun seperti yang dikemukakan tadi seperti menjual kekayaan negara dengan harga yang sangat rendah. Menangkap orang tanpa bukti kuat dikatakan mengamankan. Menganiaya dikatakan mendidik, mendevaluasi mata uang dikatakan menyesuaikan nilainya; tidak peduli bahwa kalau diukur dengan *purchasing power parity* dengan devaluasi itu nilai rupiah menjadi sangat-sangat *undervalued*. IMF yang jelas sudah memporak-porandakan perekonomian kita dikatakan membuat ekonomi kita sekarang stabil. Ekonomi dengan sendirinya menjadi stabil setelah mengalami gejala yang siklis. Yang menentukan adalah stabilnya pada tingkat yang normal atukah pada tingkat yang rusak? Tingkat suku bunga deposito yang memang menurun terus dikatakan bagus, walaupun tidak mampu menurunkan tingkat inflasi sampai di bawah bunga deposito, sehingga uang yang didepositokan digerogeti daya belinya oleh inflasi. Nilai tukar rupiah dianggap stabil, sedangkan dalam periode yang sama dengan Thailand rupiah turun dari Rp. 387 per dollar menjadi Rp. 8.500 sekarang ini, sedangkan Bath Thailand turun dari Baht 20 menjadi sedikit lebih dari Baht 40. Konglomerat jahat yang sudah terang-terangan membebani APBN ribuan trilyun dikatakan harus diberi kepastian untuk berusaha lagi supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Bank-bank yang jelas disubsidi sangat besar sampai saat ini sudah mengucurkan kredit sangat besar kepada konglomerat jahat yang sama tetapi memakai nama orang lain. Perusahaan diterima sebagai pembayaran lunas utang konglomerat jahat, tetapi sampai saat ini masih dikelola oleh mereka sepenuhnya, dan nilainya merosot tajam. Terus dikatakan itu adalah biaya krisis yang harus ditanggung oleh rakyat pembayar pajak. Kalau ada yang memprotes dan berani membela kepentingan rakyat tak berdosa yang membayar pajak dimaki bahwa rakyat pembayar pajaknya tidak mengeluh. Yang mengatakan hal yang benar itu dimaki sebagai orang yang kalau ditelusuri tidak membayar pajak, hanya ingin mencari popularitas. BUMN harus diprivatisasi karena mesti rusaknya dan mesti ruginya. Tetapi Telkom sejak tahun 1996 disehatkan. Setelah sangat sehat diprivatisasi. Ketika ditanya mengapa dijual kepada swasta dijawab bahwa kalau tidak sehat tidak laku dijual. Jadi dikatakan rusak,

merugi dan obatnya adalah penjualan kepada swasta. Tetapi ketika yang dijual jelas-jelas sangat sehat dikatakan kalau tidak sehat tidak laku dijual. Dalam satu kalimat dikemukakan pikiran yang saling bertentangan. Harus dijual karena merugi, tetapi harus untung supaya laku dijual. Apa ini kalau bukan *corrupted mind* ?

Kalau kita perhatikan semuanya ini, bukankah elit bangsa kita yang dominan bukan saja sudah terjangkau KKN luar biasa, tetapi juga sudah sakit jiwa dan pikirannya ? Apa simtom dari bangsa yang sakit ? Ya itu tadi, yang ucapan, perbuatan, perilaku dan alur pikir dari banyak elit terpandai sudah tidak bisa lagi dimengerti oleh nalar dan tata nilai tentang baik dan buruk yang paling elementer sekalipun.

Kesemuanya ini menunjukkan betapa bangsa kita sudah sakit walaupun belum separah Nazi Jerman, China kuno dan beberapa dinasti kerajaan Eropa menjelang revolusi Perancis. Penyakit bangsa seperti ini bisa berlangsung sangat lama. Di China berdinasti-dinasti. Demikian pula dengan banyak raja-raja Eropa sebelum revolusi Perancis.

Wahai para pemimpin bangsa Indonesia, apakah kita harus menjalani penderitaan karena itu adalah dialektika sejarah, karena demokrasi itu mahal, karena kita harus melalui penderitaan seperti ini untuk tiba pada demokrasi yang matang, yang cerdas walaupun harus menderita lama sekali ? Bukankah kita harus belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain dan mengatakan : "Cukup. Kita sudah mencoba 5 tahun. Tetapi ternyata hasilnya begini. Marilah kita memberanikan diri menarik konsekuensi dari apa saja yang kita anggap nalar dan baik untuk kepentingan bangsa ini ? Bukankah kita harus sudah berani melakukan introspeksi apakah demokrasi yang dikehendaki oleh bangsa lain cocok untuk bangsa Indonesia yang bagian terbesar dari rakyatnya belum mempunyai pendidikan maupun pengetahuan yang memadai untuk demokrasi model negara-negara maju ?

KESIMPULAN

Pemberantasan KKN harus diwujudkan secepatnya. Tidak melalui slogan-slogan, tetapi melalui konsep dan rencana tindak (*action plan*) yang konkret. Konsep yang saya kemukakan dalam tulisan ini dimaksud sebagai salah satu alternatif pikiran untuk mulai memberantas KKN secara konkret dan yang secara teknis memang dapat dilaksanakan.

Kerugian kebendaan yang diakibatkan oleh KKN buat bangsa kita luar biasa besarnya. Yang lebih menyedihkan, KKN terus berjalan yang semakin lama semakin hebat, dan sudah merambat ke dalam otak, budaya, gaya hidup, tata nilai yang membuat kita tidak mempunyai kepercayaan dan tidak mempunyai harga diri lagi. Secara terbuka, elit kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh asing memberi pernyataan di mana-mana bahwa Indonesia masih harus berpikir keras apakah bisa hidup terus tanpa bantuan dari lembaga-lembaga internasional yang dipimpin oleh IMF.

Kalau kita perhatikan dan baca semua publikasi dari IMF, Bank Dunia, ADB, PBB dan masyarakat internasional lainnya, isi keseluruhannya memberi arahan dan ajaran kepada pemerintah Indonesia bagaimana pemerintah harus mengurus bangsanya sendiri. Tidak sedikit yang arahan-

arahannya bersifat imperatif, merupakan *conditionalities* atau persyaratan untuk mendapatkan utang dari masyarakat internasional.

Dari pihak pemerintah sendiri, oleh para pejabat tingginya boleh dikatakan tidak ada hal lain yang dipikirkan kecuali bagaimana mendapatkan utang yang sebesar-besarnya dari negara mana saja. Buat saya yang sangat baru dalam pemerintahan sangat mengejutkan dan menyedihkan betapa utang sebanyak-banyaknya dianggap hal yang rutin dan mesti. Para pejabat itu bahkan menakut-nakuti siapa saja yang menyuarakan kemandirian sedikit saja, bahwa kalau mandiri pasti akan menderita luar biasa karena kemiskinan.

Di mana-mana di dunia bangsa Indonesia sudah dijadikan bahan hinaan dan tertawaan dalam percakapan-percakapan sosial. Namun semakin lama semakin sering publikasi internasional menggambarkan Indonesia yang sudah mirip dengan *banana republic*.

Tetapi bukannya malu dan mati-matian mengkoreksinya, melainkan minta-minta, mengemis kepada bangsa-bangsa lain. Bukannya menciptakan kekayaan, tetapi menjual apa saja yang dimilikinya dengan harga murah. Bukannya membangun industri-industri sendiri dengan semua kekayaan alam yang ada, tetapi berkeliling dunia mengemis supaya perusahaan-perusahaan asing datang berinvestasi di Indonesia. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tanggung jawab investor adalah mencari laba untuk para pemegang sahamnya, tidak membantu bangsa Indonesia secara altruistik. Semakin kita minta-minta mereka datang, semakin mereka mentertawakan dan menghina, selama mereka tidak dapat membuat laba di Indonesia.

KKN sudah membuat beberapa elit bangsa kita tidak lagi dapat berpikir secara waras. Nalarnya jungkir balik dan tanpa sadar menyatakannya di mana-mana hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal.

Sejarah telah membuktikan bahwa kalau kita sedang lemah dan terpuruk, apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan dirasakan sebagai demonstrasi kelemahan. Tetapi kalau pada suatu hari nanti kita kuat, semua gerak-gerik kita dianggap hebat.

Contoh selaku pribadi adalah Mahatma Gandhi, yang selama menjadi mahasiswa di London selalu bersikap sangat *correct* dan santun, berpakaian sangat sopan. Tetapi seringkali mahasiswa Inggris meludah di pinggir kakinya sebagai penghinaan. Namun ketika beliau berhasil menumbangkan the British Empire melalui gerakan tanpa kekerasan, dan India sudah merdeka, dan dia diundang ke London oleh Ratu Elizabeth, Gandhi hanya mengenakan cawat dan membawa tongkat. Koran-koran di London menyebutnya *the holy man* !

Contoh sebagai negara adalah China yang terpuruk selama berpuluh-puluh tahun. Mereka diisolasi oleh seluruh dunia. Mereka tidak merengek-rengok sambil melakukan *roadshow*. Mereka justru menutup diri sehingga terkenal dengan nama negara tirai bambu. Dengan pengorbanan yang luar biasa mereka bekerja keras sendirian dalam ketertutupan. Entah berapa besar korban benda maupun jiwa. Tetapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengemis dan tidak pernah minta-minta supaya investor datang. Dalam

keterpurukan dan ketertutupannya itu, mereka bahkan menolak investor asing seandainya mereka mau datang. Namun setelah dirinya kuat dan mulai membuka diri, tanpa berbicara sama sekali beberapa orang sudah mulai mengenali bahwa China sudah mulai bangkit memasuki *aufklärung* dan *renaissance*. Hanya beberapa tahun yang lalu pejabat sangat tinggi Indonesia menyatakan terbuka bahwa dalam penguasaan teknologi RRC masih ketinggalan 30 tahun dibandingkan dengan Indonesia. Sebuah lembaga pengkajian terkemuka dan ternama ketika itu juga masih mengatakan bahwa RRC masih sangat miskin dan tertinggal. Tetapi ketika majalah-majalah dan pers internasional menggambarkan bahwa RRC sedang bangkit menjadi salah satu *super power*, RRC sendiri tidak berbicara apa-apa.

Alangkah kontrasnya dengan kita yang berteriak bahwa dunia internasional mempercayai kita karena mendapat kucuran utang dari IMF sekitar rata-rata US \$ 400 juta setelah dinilai lolos menjalankan LoI dengan baik oleh IMF, padahal siapakah mereka itu ? Ini dianggap sebagai *vote of confidence*. Sudah berkali-kali IMF memberikan kucuran utangnya setiap kali RI menyelesaikan pelaksanaan LoI. Tetapi tetap saja tidak ada investor asing yang masuk. Bagaimana disebut *vote of confidence* ? IMF sendiri di mana-mana mendapatkan demonstrasi besar-besaran sebagai *vote of no confidence*. Semakin lama semakin banyak ahli-ahli Barat yang menelanjangi kebodohan IMF. Kucuran ini disebut *liquidity support*, sedangkan sebenarnya adalah *balance of payment support* yang tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa yang kita miliki habis. Nyatanya cadangan devisa kita meningkat terus. Tingkat bunga yang sekitar 4 % dikatakan sebagai *incredibly low*, sedangkan kalau kita menempatkan uang dalam dollar AS sebagai deposito berjangka hanya mendapatkan kurang dari 1 % setahun. Dikatakan bahwa utang dari IMF masih dibutuhkan sedangkan sejak kuartal pertama tahun 2001 kita sudah mulai membayar kembali. Jumlah utang dari IMF sejak tahun 1997 tidak pernah melampaui sekitar US \$ 10 milyar, karena sejak kuartal pertama tahun 2001, sambil memberi pencairan utang sedikit demi sedikit, yang dibayarkan setiap kalinya lebih besar. Toh dikatakan *liquidity support*. Lagi-lagi, bukankah kita sudah sakit karena KKN ? Bukan karena uang, tetapi KKN yang sudah menjangkiti *mindset* sehingga tidak lagi dapat melihat dan membaca dengan jernih.

Mengapa menyanjung IMF seperti itu ? Siapakah mereka itu ? Mereka itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dari perguruan tinggi yang baik di dunia. Bukankah kita juga mempunyai sangat banyak Ph.D. dari banyak perguruan tinggi terbaik di dunia ? Bahkan para ahli kita itu seratus persen pasti lebih mengetahui lapangan Indonesia ketimbang para ahli asing yang hanya berkunjung sekitar 3 minggu ke Indonesia. Mengapa dipuja seperti itu ? Mengapa para pejabat tinggi terpandai kita harus *ngapurancang* kalau berbicara dengan mereka ? Bukankah ini gejala penyakit jiwa ? Mengapa Bung Hatta di tahun 1928 begitu tajam mengkritik para hakim di Den Haag dan Bung Karno di tahun 1930 di Bandung yang terkenal dengan "Indonesia menggugat" ? Mereka memberikan kuliah kepada para hakim Belanda dalam kursi terdakwa ! Para ahli terpandai kita membungkuk dan *ngapurancang* di tahun 2003 !

Pantaskah Indonesia yang sudah 58 tahun merdeka masih ditongkrongi oleh kantor-kantor perwakilan Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia ? Kapan mereka harus pergi dari Indonesia supaya tidak lagi mendikte kita

dengan LoI dan sampai tahun 2007 nanti dengan *white paper* ? Kapan Bank Dunia pergi dari Indonesia sehingga tidak perlu mendikte Indonesia lagi dengan *Country Strategy Report, Country Assistance Report, Medium Term Expenditure Framework* dan entah apa lagi. Kapan mereka berhenti memperlakukan bangsa Indonesia sebagai Flipper dengan *high case* dan *low case scenario* dengan titik tolak pikiran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pengemis yang haus akan utang ? Bukankah mereka itu rentenir yang oleh kita diagungkan sebagai donor ? Siapa mereka itu ? Lebih tinggikah IQ maupun EQ-nya ? Lebih lengkap dan lebih baikkah *body of knowledge* yang mereka kuasai, terutama tentang lapangan di Indonesia ?

Dikatakan terang-terangan di mana-mana oleh para pembentuk opini publik bahwa kecuali uangnya, IMF beserta seluruh gerbongnya yang Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan CGI sangat diperlukan untuk mendisiplinkan para pemimpin Indonesia. Beberapa menteri tertentu dari kelompok tertentu pula sejak era Presiden Soeharto sampai sekarang sengaja melakukan penekanan-penekanan dan menakut-nakuti Presidennya sendiri lewat para pejabat IMF dan lembaga internasional lainnya bahwa kalau tidak nurut lembaga-lembaga internasional yang mereka pertuankan, bangsa Indonesia akan celaka, akan hidup sangat sengsara, akan timbul revolusi sosial dan sebagainya.

Saya ketakutan bahwa siapapun Presiden yang akan terpilih di tahun 2004 nanti segera saja akan disodori bahwa Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Menko Perekonomian, Menperindag dan Menteri Pertambangan harus orang-orang yang ditunjuk oleh mereka. Kalau tidak mau, IMF akan menggunakan PPM untuk mengumumkan kepada dunia betapa jeleknya kebijakan dan pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia. Berbarengan dengan itu, kelompok ekonom orde baru akan mempengaruhi pembentukan opini publik seraya menakut-nakuti Presiden terpilih kalau tidak nurut sepenuhnya kepada seluruh masyarakat internasional sebagai kartel di bawah pimpinan IMF dan Bank Dunia.

Kalau kita hanya dapat mengurus diri sendiri atas tekanan, arahan dan rangsangan utangan yang diberikan bagaikan pawang memberikan makanan kepada ikan Flipper untuk berkinerja, buat apa kita dahulu merdeka ? Bukankah Belanda mengajukan tawaran kepada Bung Karno dan rekan-rekannya supaya menunda kemerdekaan barang 10 sampai 15 tahun. Maksudnya supaya Belanda dapat mengajari para pemimpin Indonesia bagaimana mengurus negara sambil memberikan bantuan keuangan yang diperlukan dalam proses belajar ini ?

Bung Karno menolak keras yang tercermin dengan tajam dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang sekarang terkenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Ketika itu Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka sekarang juga, menit ini juga walaupun dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang seperti apapun juga. Dalam alam kemerdekaan itulah kita membangun menurut pola dan yang sesuai dengan kehendak kita sendiri. Itulah hakikat dari kemerdekaan yang diperjuangkan sekian lama dengan pengorbanan yang tidak terhingga.

Sebagai penutup dari bab Kesimpulan ini, marilah kita kemukakan sekali lagi berapa jumlah uang yang kita sia-siakan setiap tahunnya. Rekapitulasi jumlah uang yang terkorup adalah : Perpajakan dan kebocoran

pembelanjaan pemerintah Rp. 215 trilyun. Pencurian ikan, pasir dan kayu Rp. 76,5 trilyun. Subsidi bank rekap yang tidak perlu Rp. 14 trilyun. Seluruhnya Rp. 305,5 trilyun.

GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA

Saya mengakhiri tulisan ini dengan paragraf yang berjudul “Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua.” Mengapa ? Karena seperti baru saja kita baca, KKN telah membuat kita tidak lagi mandiri dalam keuangan, pikiran dan dalam jiwa kita. Seluruh perjuangan kita untuk merdeka sudah menjadi mubasir kalau kita ukur dengan sampai di mana kita mempunyai kebebasan menentukan nasib bangsa kita sendiri.

Itulah sebabnya kita harus melengkapi kerja keras memberantas KKN dengan gerakan kemerdekaan kedua, karena kemerdekaan yang telah kita rebut dalam gerakan kemerdekaan pertama boleh dikatakan sudah sirna walaupun tidak boleh dikatakan sudah hilang sama sekali.

Gerakan kemerdekaan kedua ini mengandung tekad dan kesiapan untuk mundur dalam tingkat hidup kita, tetapi juga mengurangi jumlah utang kita. Gerakan ini, seperti halnya gerakan kemerdekaan yang pertama membawa konsekuensi pengorbanan. Tetapi pengorbanannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh para pendiri bangsa kita beserta generasinya.

Kita sekarang memang jauh lebih makmur, tetapi semuanya dengan utang dan dengan pengurusan potensi apa saja untuk generasi sekarang. Dan lebih makmurnya itu hanya buat lapisan teratas dari bangsa kita. Bagian terbesar dari rakyat kita yang masih miskin tidak mengalami perbaikan nasib sejak zaman penjajahan. Alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap generasi mendatang !

Para tokoh dan pemimpin masyarakat yang masih terus menerus mempunyai hubungan dengan massanya hendaknya berkumpul bermusyawarah bersama. Namakanlah itu Kongres (atau Musyawarah) Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Ini bukan organisasi, sehingga tidak mengganggu dan tidak menyaingi lembaga-lembaga formal yang ada seperti DPR, MPR, Pemerintah, DPA dan sebagainya. Bedanya dengan lembaga-lembaga formal yang ada, para tokoh yang bermusyawarah itu masih mempunyai kontak erat dengan massanya, sedangkan yang dibawa pada kekuasaan oleh rakyatnya sudah banyak yang tidak lagi membela kepentingan rakyat yang membawanya pada kekuasaan tersebut.

Gerakan Kemerdekaan Kedua tidak berarti anti asing. Kita akan tetap bergaul dengan masyarakat internasional, bersahabat dengan bangsa manapun juga. Tetapi pada derajat yang sama, tidak dengan tangan yang menadah ! Persahabatan sejati, kokoh dan langgeng hanya ada di antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya.

Kerugian Bank-Bank Rekap Bila Bunga O.R Dicabut (per 31 Desember 2002)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Bank	Laba (Rugi) Bersih	Bunga O.R	Laba (Rugi) Tanpa Bunga O.R
1	Bank Mandiri	5.809.970.000.000	21.434.822.000.000	(15.624.852.000.000)
2	Bank Negara Indonesia	2.510.653.000.000	7.537.490.000.000	(5.026.837.000.000)
3	Bank Rakyat Indonesia	1.469.670.000.000	3.735.770.000.000	(2.266.100.000.000)
4	Bank Tabungan Negara	303.043.000.000	1.844.796.000.000	(1.541.753.000.000)
5	Bank Internasional Indonesia	131.876.000.000	2.207.806.000.000	(2.075.930.000.000)
6	Bank Danamon	989.284.000.000	3.331.297.000.000	(2.342.013.000.000)
7	Bank Permata	(847.855.000.000)	1.106.363.000.000	(1.954.218.000.000)
8	Bank Niaga	76.593.000.000	1.134.047.000.000	(1.057.454.000.000)
9	Bank Lippo	192.564.000.000	739.755.000.000	(547.191.000.000)
10	Bank Central Asia	3.400.066.000.000	8.591.568.000.000	(5.191.502.000.000)
	Jumlah	14.035.864.000.000	51.663.714.000.000	(37.627.850.000.000)



Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu untuk membaca buku kecil ini. Di semua negara terdapat korupsi. Namun di Indonesia korupsi dibiarkan berkembang sampai berakar sangat dalam dan membudaya sangat luas, sehingga korupsi dilakukan secara besar-besaran, bersama-sama dengan banyak orang sekaligus tanpa risi dan tanpa rasa malu. Korupsi kebanyakan dipicu oleh dorongan dan bahkan rayuan dari para anggota keluarga atau sanak saudara. Itulah sebabnya disebut secara lengkap dengan istilah sangat tepat yang sekarang telah membudaya, yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kerusakan yang diakibatkan oleh KKN sudah sangat besar. Bukan saja kerugian material, tetapi karena KKN, kita juga sudah kehilangan kemandirian dalam merumuskan kebijakan dan karena itu juga tidak mandiri lagi dalam menentukan nasib bangsa kita sendiri.

KKN menyusup ke mana saja, sehingga KKN merupakan akar penyebab dari hampir semua masalah yang kita hadapi. KKN bahkan sudah membuat pikiran, mental dan jiwa kita tidak lagi normal, sehingga kebijakan yang tidak jernih sudah sangat menyengsarakan rakyat banyak serta menciptakan ketidakadilan yang tiada taranya.

Maka bukan saja sudah tiba waktunya, tetapi kita sudah terlambat melakukan pemberantasan KKN yang sungguh-sungguh, yang tidak basa-basi, dan yang hanya mengemukakan keinginan saja tanpa langkah-langkah dan rencana tindak yang konkret dan secara teknis memang dapat diwujudkan.

Buku kecil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya kita memberantas KKN. Saya yakin bahwa hanya dengan berkurangnya KKN secara signifikan, kemandirian, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan dengan sendirinya akan meningkat sangat signifikan pula.